

**PERAN PENYULUH PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PETANI IKAN LELE DI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

MUHAMMAD NUR NASUTION

NPM. 221801005



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERAN PENYULUH PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PETANI IKAN LELE DI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

MUHAMMAD NUR NASUTION

NPM. 221801005

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peran Penyuluh Perikanan Dalam Peningkatan Kualitas Petani Ikan Lele
di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara**

Nama : MUHAMMAD NUR NASUTION

NPM : 221801005

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



Dr. Adam, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 21 September 2024

Nama : Muhammad Nur Nasution

NPM : 221801005



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Sekretaris : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)30/12/24

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi , dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Nur Nasution

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Nasution
NPM : 221801005
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Penyuluh Perikanan Dalam Peningkatan Kualitas Petani Ikan Lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Muhammad Nur Nasution

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peran Penyuluh Perikanan Dalam Meningkatkan Kualitas Petani Ikan Lele Di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari teknik penulisan maupun kedalaman materinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Medan, 2024

Penulis



Muhammad Nur Nasution

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, MAP selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Warjio, MAP selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Adam, MAP selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Ralasen Ginting, SP. M.M selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai , yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Muhammad Iqbal Nst , S.Pi selaku Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan Bapak Jamalul,S.Pi selaku Koordinator penyuluh perikanan Kota Binjai, serta para petani ikan

lele sebagai informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.

8. Kedua orang tua tercinta (Alm. Burhanuddin Nasution dan ibunda Hj.Aminah), yang telah berjasa besar dalam perjalanan kehidupan penulis, dan kepada seluruh keluarga: kakak, abang dan adik untuk doa, semangat dan materi yang diberikan.
9. Istri (Uni Sari Tarigan, SE) dan anak-anak tercinta (Zea, Azka dan Syafira) atas doa, semangat dan dorongan serta pengorbanan yang tulus dalam mendampingi penulis menyelesaikan studi dan tesis ini.
10. Para Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, serta seluruh teman Magister Administrasi Publik yang selalu memberi dukungan dan semangat.

Dengan penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan pada segala pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Medan, 2024

Penulis

Muhammad Nur Nasutio

ABSTRAK

PERAN PENYULUH PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PETANI IKAN LELE DI KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Muhammad Nur Nasution
N P M : 221801005
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio, MAP
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Kualitas petani ikan lele dipahami sebagai kombinasi pengetahuan teknis, keterampilan praktis, manajemen usaha, dan tingkat penerimaan inovasi yang memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya ikan lele. Metodologi penelitian melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis data sekunder untuk memahami kondisi petani ikan lele dan efektivitas peran penyuluh perikanan. Data akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang holistik tentang kontribusi penyuluh perikanan terhadap peningkatan kualitas petani ikan lele. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek spesifik yang perlu ditingkatkan oleh penyuluh perikanan, seperti peningkatan pengetahuan teknis, penerapan praktik budidaya yang lebih efisien, dan manajemen usaha yang lebih baik. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan program penyuluhan perikanan dan strategi pengembangan berkelanjutan bagi petani ikan lele di Kota Binjai dan wilayah sekitarnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada literatur pengetahuan tentang peran penyuluh perikanan dalam konteks pengelolaan perikanan dan pemberdayaan Petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: Peran, Penyuluh Perikanan, Kualitas Petani ikan

ABSTRATC

THE ROLE OF FISHERY EXTENSIONS IN IMPROVING QUALITY CATFISH FARMERS IN BINJAI CITY NORTH SUMATRA PROVINCE

Name : ***Muhammad Nur Nasution***
N P M : ***221801005***
Study Program : ***Magister Ilmu Administrasi Publik***
Advisor I : ***Dr. Warjio, MAP***
Advisor II : ***Dr. Adam, MAP***

This research aims to investigate and analyze the role of fisheries extension officers in improving the quality of catfish farmers in Binjai City, North Sumatra Province. The quality of catfish farmers is understood as a combination of technical knowledge, practical skills, business management, and the level of innovation acceptance that affects the productivity and sustainability of catfish farming. The research methodology involves field surveys, interviews, and secondary data analysis to understand the conditions of catfish farmers and the effectiveness of the role of fisheries extension officers. The data will be analyzed qualitatively and quantitatively to obtain a holistic picture of the contribution of fisheries extension officers to the improvement of catfish farmer quality. The results of the research are expected to provide in-depth insights into specific aspects that need improvement by fisheries extension officers, such as increasing technical knowledge, implementing more efficient aquaculture practices, and better business management. The implications of this research can be used as a basis for improving fisheries extension programs and sustainable development strategies for catfish farmers in Binjai City and surrounding areas. This research is expected to contribute to the knowledge literature on the role of fisheries extension officers in the context of fisheries management and the empowerment of fishing community

Keywords: Role, Fisheries Extension Officer, Farmer Quality

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRATC</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Peran Pemerintah	10
2.1.1. Konsep Peran	10
2.1.2. Konsep Pemerintah	14
2.1.3. Peran Pemerintah	17
2.2 Penyuluhan	24
2.2.1. Pengertian Penyuluhan	24
2.2.2. Metode Penyuluhan	24
2.2.3. Alat Bantu Penyuluhan	25
2.3 Penyuluhan Perikanan	28
2.4 Kualitas Sumber Daya Manusia	32
2.5 Macam-macam Kualitas Sumber Daya Manusia	33
2.6 Kualitas Petani.....	35
2.7 Peternakan Ikan Lele	37
2.8 Keterbatasan Anggaran	41
2.9 Sarana dan Prasarana Yang Masih Tradisional.....	43

2.10 Penelitian Terdahulu	46
2.11 Kerangka Berfikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	50
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.4 Jenis dan Sumber Data	51
3.4.1 Data Primer.....	52
3.4.2 Data Skunder.....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Teknik Analisis Data	54
3.7 Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	57
3.7.1 Definisi Konsep.....	57
3.7.2 Definisi Operasional.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	61
4.1.1 Visi Misi.....	61
4.1.2 Struktur Organisasi.....	62
4.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Kantor	63
4.3 Pembahasan	69
4.3.1 Analisis Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Kualitas Petani Lele Di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.....	69
4.3.2 Analisis Faktor Penghambat Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Kualitas Petani Lele Di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara	97
4.4 Keterkaitan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	50
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.4 Jenis dan Sumber Data	51
3.4.1 Data Primer	52
3.4.2 Data Sekunder	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Teknik Analisis Data	54
3.7 Definisi Konsep dan Definisi Operasional	57
3.7.1 Definisi Konsep	57
3.7.2 Definisi Operasional	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60
4.1.1 Visi Misi	60
4.1.2 Struktur Organisasi	61
4.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Kantor	62
4.3 Pembahasan	68
4.3.1 Analisis Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Kualitas Petani Lele Di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara	68
4.3.2 Analisis Faktor Penghambat Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Kualitas Petani Lele Di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara	96
4.4 Keterkaitan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu	98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Produksi Ikan Lele Kota Binjai Tahun 1016-2022.....	3
Tabel 2	Struktur Organisasi.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berfikir.....	49
Gambar 2	Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner Penelitian	109
Lampiran 2	Dokumentasi wawancara	112



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Pembangunan nasional salah satu perhatian utama pemerintah adalah sektor ketahanan pangan dan ekonomi Masyarakat. Jaminan ketersediaan pangan dan peningkatan ekonomi Masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. peningkatan pemberdayaan Masyarakat baik bidang ketahanan pangan seperti pertanian, peternakan dan perikanan serta industrinya diharapkan dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian nasional. Sektor Perikanan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Melakukan kegiatan budidaya ikan adalah salah satu kegiatan utama yang sudah lama dilakukan Masyarakat Kota Binjai salah satu jenis Budidaya yang paling banyak dilakukan adalah budidaya ikan lele dikarenakan tingginya permintaan pasar dan ketrampilan serta ketersediaan lahan perkotaan yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan lele.

Suherman (12: 2009). Kebutuhan ikan di Pasar Lokal dan Nasional maupun pasar global dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin banyaknya permasalahan penyakit pada komoditas selain ikan, terutama komoditas hewan ternak sebagai penghasil sumber protein hewani utama selama

ini, seperti pada unggas dan sapi oleh karena itu peningkatan produksi ikan sebagai salah satu sumber pangan dan sumber protein sangat dibutuhkan. Saat ini sumberdaya ikan telah menjadi komoditas unggulan Adam (54:2012), seiring dengan perubahan pola konsumsi daging dari pola red meat ke white meat (Kusumastanto, 2008). Sebanyak 57,2% kebutuhan jumlah konsumsi protein hewani berasal dari ikan, sisanya 23,2% berasal dari telur serta susu dan daging sebanyak 19,6%, jumlah konsumsi ikan setiap orangnya pada tahun 2008 rata-rata 28 kg/tahun dan pada tahun 2010 dan 2030 diperkirakan akan naik menjadi 30 kg/tahun dan 45 kg/ tahun (Putri, 2014), (Direktorat Jenderal Pengolahan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan, 2013). Angka ini menunjukkan bahwa ikan masih menjadi sumber protein yang utama di masyarakat.

Kota Binjai sebagai salah satu daerah di Indonesia yang terletak sekitar 22 km di sebelah barat ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Letak geografis Kota Binjai 03°03'40"-03°40'02" LU dan 98°27'03"-98°39'32" BT, dengan luas wilayah 93,77 Km² ketinggian rata-rata adalah 28 meter di atas permukaan laut. Kota Binjai terdiri dari 5 Kecamatan dan 37 Kelurahan dengan jumlah penduduk Kota Binjai sebanyak 300.009 jiwa (BPS:2021), dengan kepadatan 3.095 jiwa/km².

Kota Binjai memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, terutama dalam budidaya ikan lele. Sektor ini merupakan komponen penting dalam menyediakan pangan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Dengan status Kota kecil yang memiliki luas wilayah yang tidak terlalu luas namun Kota Binjai memiliki potensi perikanan yang besar yang mana produksi ikan lele kota binjai menjadi salah yang terbesar di Provinsi Sumatera Utara produksi per tahunnya mencapai \pm 4000 ton, yang dipasarkan sampai keluar wilayah Binjai. Angka ini dapat dilihat dari data Binjai dalam angka yang diliris oleh BPS sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Produksi Ikan Lele Kota Binjai Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah Produksi Ikan Lele
2016	3 366,01
2017	3 641,16
2018	4 006,18
2019	4 272,27
2020	4 428,76
2021	4 050,60
2022	4 275,742

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai,2022.

Meskipun memiliki produksi yang besar, petani ikan lele di Kota Binjai masih memiliki kendala dalam peningkatan perekonomiannya hal ini disebabkan persaingan pasar yang menuntut peningkatan kualitas produk yang berimbang terhadap harga jual

petani, biaya produksi seperti pakan dan benih yang selalu meningkat penyediaan sarana dan prasarana budidaya yang berkelanjutan, akses



informasi dan teknologi dan lain-lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas petani ikan lele dalam peningkatan kesejahteraannya. Peningkatan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai diharapkan dapat berdampak positif pada ekonomi lokal, melalui peningkatan produksi dan pendapatan petani, serta peningkatan kontribusi sektor perikanan dalam penyediaan pangan dan sumber daya ekonomi masyarakat.

Peran Penyuluhan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa penyuluhan dalam hal ini adalah petani. Kelembagaan penyuluhan salah satu organisasi non-profit yang dimiliki oleh pemerintah. Organisasi ini memberikan jasa layanan kepada masyarakat terutama petani untuk memperoleh informasi mengenai program-program pertanian serta informasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pertanian mulai dari sub sektor hulu sampai sub sektor hilir. Kelembagaan penyuluhan merupakan suatu faktor penentu yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan tercapainya tujuan pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan dibentuk untuk memwadahi proses dan kegiatan penyuluhan. Sistem penyuluhan yang dahulu hanya terdiri dari petani, penyuluh dan kelembagaan struktural saat ini menjadi lebih lengkap yaitu terdiri dari petani, penyuluh, pelaku agribisnis lainnya. Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian nomor: 273/KPTS/OT.160/4/2007, kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan pendekatan kelompok. Kelompok ini dibentuk di tingkat desa dan sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu sektor yang banyak dikembangkan dikalangan masyarakat, dimana perikanan merupakan sektor ekonomi yang mempunyai potensi dan peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor perikanan juga mempunyai andil dalam pembangunan nasional dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyedia bahan baku pendorong agroindustri, peningkatan devisa melalui penyediaan ekspor hasil perikanan, penyedia kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nelayan atau petani ikan dan pembangunan daerah, serta peningkatan kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan hidup (Husniyah, 2016). Sektor perikanan merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil sumberdaya perikanan baik untuk perikanan laut maupun perikanan darat, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan peran Penyuluh Perikanan dalam melakukan pendampingan dan penyuluhan untuk pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh petani ikan lele di Kota Binjai. Pemahaman mendalam terhadap masalah tersebut menjadi krusial untuk merancang solusi yang tepat guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan kontribusi sektor perikanan dalam skala lokal. Dari jumlah produksi ikan lele yang dihasilkan petani di Kota Binjai tidak lepas dari peran Kualitas petani ikan lele, baik dari aspek teknis budidaya maupun manajemen usaha, perlu ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks ini, peran penyuluh perikanan menjadi sangat vital. Penyuluh perikanan memiliki tanggung

jawab untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada petani ikan lele sehingga mereka dapat mengimplementasikan praktik budidaya yang baik dan efektif.

Dari hasil pengamatan dilapangan dan interaksi dengan petani ikan lele dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi petani ikan lele di Kota Bnjai Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Kualitas produk yang rendah:

Sebagian petani ikan lele mungkin mengalami kendala memenuhi standar produk. Hal ini termasuk hasil pembenihan yang kurang unggul, kualitas dan kuantitas ikan lele yang fluktuatif, dan ketersediaan hasil produksi yang tidak stabil.

2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Tingkat pengetahuan yang terbatas tentang praktik budidaya modern dan konsep manajemen yang efektif dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas. Keterbatasan pendidikan formal juga dapat mempengaruhi kemampuan petani untuk memahami dan mengimplementasikan inovasi.

3. Sarana dan prasarana petani ikan yang masih tradisional:

Beberapa petani ikan lele mungkin menghadapi kendala terkait kondisi kolam ikan yang tidak optimal, penggunaan peralatan budidaya yang masih tradisional, manajemen air dan drainase yang seadanya, dan keberlanjutan pengelolaan kolam.

4. Keterbatasan Akses ke Sumber Daya dan Pasar:

Petani ikan lele dapat mengalami keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya yang mendukung budidaya, seperti bibit unggul dan pakan berkualitas. Selain itu, keterbatasan akses ke pasar dapat membatasi peluang pemasaran dan peningkatan pendapatan.

5. Keterbatasan anggaran untuk pembinaan terhadap usaha petani ikan lele yang rendah:

Pembinaan pada usaha budidaya ikan lele masih kurang, baik dalam hal pemasaran yang berkaitan erat dengan produksi, efisiensi, harga dan pendapatan, maupun pada pengolahan hasil budidaya yang dapat menambah kualitas produksi petani.

Dari penjelasan diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluhan perikanan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kualitas Produksi Yang Rendah, keterbatasan akses pasar dan Keterbatasan Anggaran yang menyebabkan lambatnya perkembangan atau kemajuan pembangunan sektor perikanan khususnya petani ikan lele dalam peningkatan kualitas. Mayoritas permasalahan yang diamati berkaitan dengan peran penyuluh perikanan yang berhubungan langsung dengan para petani ikan lele. Dari latar belakang masalah diatas penulis menetapkan Judul penelitian ini adalah **—Peran Penyuluh Perikanan Dalam Meningkatkan Kualitas Petani Ikan Lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara—**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa faktor kendala penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ataupun menganalisis secara ilmiah dari hal – hal dibawah ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kendala penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di Peranan Penyuluh Perikanan dalam Meningkatkan Kualitas Petani Ikan

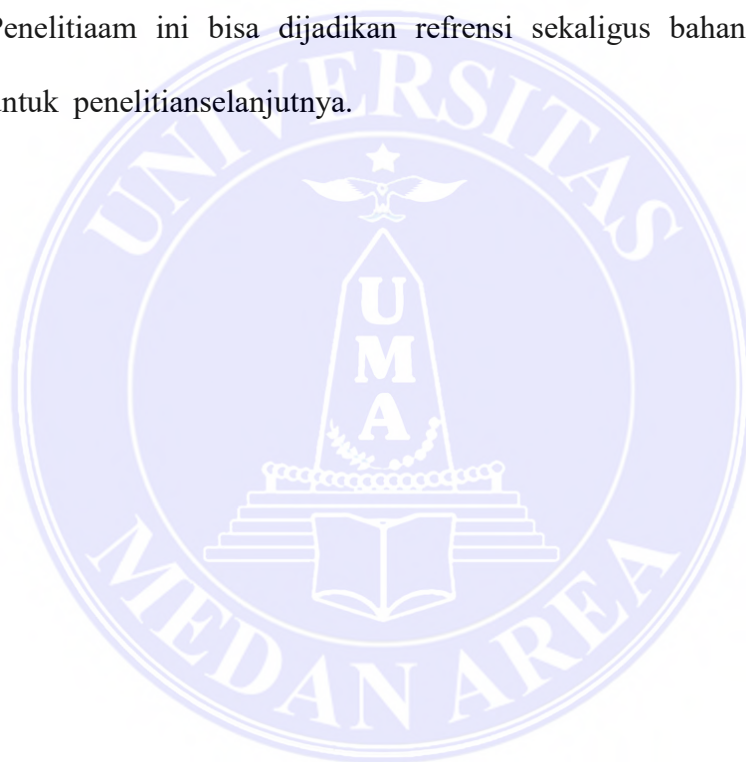
Lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Peranan Penyuluh Perikanan dalam Meningkatkan Kualitas Petani Ikan Lele di Kota Binjai. Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan referensi sekaligus bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah

2.1.1 Konsep Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam bukunya Sarwono (2011:224), peran adalah seperangkat formulasi yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi tertentu. Peran memiliki empat istilah, yakni :

- a. Harapan tentang Peran adalah asumsi bagi orang lain secara keseluruhan tentang cara berperilaku yang benar, yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang memainkan peran tertentu.
- b. Norma
Orang sering mengacaukan ungkapan "harapan" dengan "norma". Bagaimanapun, menurut Secord dan Backman (1964) "norma" hanyalah satu jenis "harapan".
- c. Wujud perilaku
Variasi dalam teori peran ini dianggap normal dan tidak memiliki batas. Sama halnya dengan teater di mana tidak ada aktor yang identik secara sempurna dalam peran tertentu. Bahkan aktor dapat memainkan peran tertentu dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, teori peran cenderung mengelompokkan istilah-istilahnya bukan menurut tindakan tertentu, tetapi menurut klasifikasi menurut asal tindakan dan sifat tujuannya

(atau motifnya). Misalnya, bentuk-bentuk perilaku peran dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti prestasi kerja, prestasi sekolah, prestasi olahraga, disiplin anak, mencari nafkah, dan menjaga ketertiban.

d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi sangat sulit dipisahkan dari makna ketika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan keduanya didasarkan pada ekspektasi normatif masyarakat. Orang menggunakan norma untuk menyampaikan kesan positif atau negatif dari perilaku. Kesan negatif atau positif ini disebut penilaian peran. Sanksi di sisi lain merujuk pada upaya orang untuk mengubah apa yang sebelumnya dianggap negatif menjadi positif dengan mempertahankan nilai-nilai positif atau mengubah karakteristik peran.

Berdasarkan paparan Biddle dan Thomas di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan lebih berpusat di sekitar cara berperilaku dan hubungan individu dalam aktivitas publik di mana kepemilikan pekerjaan tergantung pada tingkat yang lebih besar terhadap situasi individu dalam aktivitas publiknya. Iklim dan perilaku yang ditampilkan selama waktu yang dihabiskan untuk bekerja sama dengan orang lain.

Riyadi (2002:138) menyatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Dengan peran tersebut, pelaku baik itu individu maupun organisasi akan

berperilaku sesuai harapan masyarakat atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan secara terstruktur, baik norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya. Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan perangkat perilaku dalam kelompok, baik kecil maupun besar, yang menjalankan berbagai peran. Peran dapat dirumuskan juga sebagai satu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Bagaimana suatu peran dijalankan dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Peran yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah mempunyai peran yang sama

Menurut Poerwadarminta, (Cahya, 2017:22) peran dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau perkumpulan dalam suatu keadaan atau kesempatan tertentu, dimana cara bertingkah laku yang diselesaikan merupakan suatu kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berdomisili atau memiliki situasi tertentu atas permintaan publik.

Pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) dibagi menjadi :

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan posisinya di dalam kelompok.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan anggota kelompok kepada kelompok, memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah kontribusi pasif oleh anggota kelompok, yang menahan diri dari memberikan fungsi lain dalam kelompok

kesempatan untuk berhasil.

Menurut Soekanto, peran adalah proses dinamis status atau kedudukan, menyiratkan kinerja peran ketika menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran itu. Perbedaan posisi dan peran saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung satu sama lain.

Sutarto (2009:138-139) merekomendasikan peran menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Konsep peran, yakni keyakinan individu tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain tentang bagaimana seseorang dalam posisi tertentu harus berperilaku.
- c. Implementasi peran, yaitu perilaku aktual seseorang pada posisi tertentu

Ketika ketiga unsur tersebut selaras, maka interaksi sosial akan berkelanjutan dan lancar. Berdasarkan pendapat ini, peran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari individu dalam hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang terkait dengan posisi atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran muncul ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya.
- d. Ada tindakan dan peran yang terjadi ketika diberi kesempatan. Peran

adalah tindakan yang memaksa individu atau organisasi untuk melakukan kegiatannya dengan sebaik-baiknya, berdasarkan tujuan dan kondisi yang disepakati secara umum.

2.1.2 Konsep Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan dicirikan sebagai suatu proses untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau suatu tata cara untuk menyelesaikan perintah, yang mengawasi yang memerintah.

Max Weber (dalam Dahl, 1994) mencirikan pemerintah sebagai apapun yang berlaku sehubungan dengan mendukung klaim bahwa dia memiliki hak selektif untuk menggunakan kekuasaan yang sebenarnya untuk melaksanakan pedomannya dalam batas wilayah tertentu.

Soewargono, 1979 dalam (Sumaryadi, 2010:20), mengartikan otoritas publik sebagai pemegang kekuasaan politik, yang sering disebut sebagai penguasa sebagai kepala pemerintahan umum.

Surbakti (1992:167) mengartikan bahwa administrasi (pemerintahan) secara etimologis berasal dari kata Yunani; Kubernan atau nahkoda kapal, yang berarti melihat ke depan, memutuskan berbagai strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan Negara - masyarakat, memperkirakan arah kemajuan negara-masyarakat di kemudian hari dan bersiap-siap bergerak untuk memenuhi perbaikan masyarakat sebagai serta mengawasi dan membimbing daerah setempat menuju tujuan yang ideal. Dengan cara ini, kegiatan pemerintah lebih kearah pada penentuan dan menjalankan pilihan politik untuk mencapai tujuan negara bagian lokal.

Ndraha (2003) mencirikan pemerintah sebagai organisasi yang memproses kepuasan kebutuhan manusia sebagai pengguna produk pemerintah dalam administrasi umum dan sipil. Pemerintah (government) terbentuk dari pendelegasian kekuasaan rakyat. Sementara pemerintahan (governance) mengacu pada kapasitas dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri, mengacu pada metode manajemen. Governance pada tingkat yang lebih besar merupakan kekhasan sosial, dan lebih luas daripada pemerintah (government). Pemerintah membutuhkan proses politik. Governance menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan sementara government menunjuk pada organ. Gagasan tentang government mengacu pada organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (pemerintah dan negara). Gagasan governance tidak hanya mencakup otoritas pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat dan cakupannya lebih luas.

Jum anggraini (2012:14) menyatakan bahwan pemerintah berasal dari kata Yunani —crateinl. Dalam bahasa Inggris, istilah pemerintah disebut dengan Government, yang berasal dari bahasa Latin —Gubernaculun” yang berarti membimbing. Gubernaculun di Indonesia diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. Secara etimologi, pemerintah berasal dari kata dasar —perintahl yang berarti menyuruh untuk melakukan sesuatu sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintah dari perspektif yang luas adalah kemampuan yang mencakup tindakan, perbuatan dan keputusan oleh perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah (administrasi). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah

organ/badan/perangkat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan ataupun tugas-tugas memerintah.

Pemerintah dapat dikatakan sebagai suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Pemerintah juga diartikan sebagai sekelompok orang yang secara kolektif memikul tanggung jawab terbatas untuk menjalankan kekuasaan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan tujuan mempercepat terwujudnya kepentingan bersama melalui perbaikan, pelayanan dan pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan asas demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan ciri khas daerah dalam sistem kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat 2 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama. Peran pemerintah daerah adalah dalam kegiatan pengelolaan, memberikan informasi, pengetahuan dan edukasi tentang pengelolaan usaha perikanan. Kelembagaan yang dibentuk diharapkan dapat mendorong modal sosial nelayan atau petani/pembudidaya ikan dan memungkinkan mereka memiliki kekuatan sosial yang lebih besar dalam ekonomi mandiri mereka. Pembinaan dan pendidikan adalah peran kunci bagi pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan atau petani/pembudidaya ikan

yang lebih mandiri.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah dan badan perwakilan rakyat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Namun dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah poin (Y) pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan pada Sub Urusan Perikanan Tangkap, Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.3 Peran Pemerintah

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis yang berkaitan dengan fungsinya selaku —pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan

ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan, dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu (Riyadi & Bratakusamah, 2004: 8). Dalam pengertian ini, pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan.

Menurut arif (Muhardi, dkk, 2014:69) Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberi acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat.
2. Pemerintah sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi multi pihak saat stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah).

Sebagai dinamisor, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.
4. Pemerintah sebagai katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi

Menurut Ndraha (1987:110) berpendapat bahwa peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat sangat luas, mulai dari pelayanan operasional hingga ideologis dan spiritual, peran pemerintah yang otoritatif dan kemampuan pemimpin untuk melaksanakannya sangat menentukan. Karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Rasyid (2000:48) mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik senantiasa didasarkan pada usaha-usaha pokok dan kemampuan-kemampuan yang dikelola dengan pedoman-pedoman yang direkomendasikan dan pelaksanaan tugas dan kemampuan dasar itu bergantung pada pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini, kegiatan yang harus dilakukan/diselesaikan memiliki tiga kemampuan mendasar, tepatnya: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Dalam hubungan ini ditegaskan bahwa pelayanan yang baik akan memberikan keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah untuk mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Tugas pemerintah daerah dalam peningkatan daerah adalah suatu pemerintahan yang mempunyai kekuatan vital dan kedudukan penting, hal ini berkaitan dengan kemampuannya sebagai bantuan masyarakat untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah, keamanan, pemerataan, keberhasilan dan kerukunan bagi daerah (Hayat dkk., 2018)

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah menurut (Arsyad Lincolin ,2000)) adalah :

1. Pelaku usaha (*Entrepreneur*), yaitu pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha.
2. Koordinator, yang mengatur regulasi dan mengusulkan strategi dalam pembangunan.
3. Fasilitator sarana dan prasarana.
4. Stimulator, penggerak dalam peningkatan usaha melalui tindakan.

Menurut Davey (2011:21) menyatakan bahwa ada lima fungsi utama pemerintahan,

yaitu :

1. Fungsi penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
2. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
3. Fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
4. Fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
5. Fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata gubahan.

Menurut Siagian (2012: 128), fungsi utama pemerintahan negara adalah pengaturan dan pelayanan. Fungsi regulasi biasanya dikaitkan dengan karakter negara modern sebagai negara hukum, dan fungsi pelayanan dengan karakter negara sebagai negara kesejahteraan. Di sini jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan mengontrol masyarakat, dengan tujuan menegakkan hukum dan membawa kemakmuran bagi warganya.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional digambarkan lebih jelas dan rinci oleh Siagian (2012:142-150). Bahwa pemerintah memainkan peran

dominan dalam proses pembangunan. Peran yang ditekankan adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri .

- a. Stabilisator, kiprah pemerintah merupakan mewujudkan perubahan tanpa berubah sebagai suatu gejala sosial, yang bisa menjadi ancaman bagi keutuhan nasional dan kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut bisa terwujud dengan cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses pengenalan yang elegan namun efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang sedikit demi sedikit namun berkesinambungan
- b. Inovator, dalam menjalankan perannya sebagai inovator, seluruh pemerintah harus menjadi sumber inovasi. Oleh karena itu, kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar dapat menjalankan perannya secara efektif memerlukan tingkat legitimasi yang tinggi. Misalnya, pemerintah yang "memenangkan" perebutan kekuasaan atau memenangkan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil dengan sedikit legitimasi akan kesulitan untuk membawa inovasinya ke publik. Tiga hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah penerapan inovasi pertama yang dilakukan dalam lingkungan birokrasi, inovasi konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan setiap negara ingin berubah menjadi negara yang kuat, mandiri dan diperlakukan sederajat

oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki sehingga mempunyai nilai tambah yang tinggi. Sistem pendidikan nasional yang tangguh, yang membentuk masyarakat yang produktif, landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, mempunyai visi yang jelas mengenai masa depan yang diinginkan sebagai orientasi.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah wajib sebagai panutan (*role model*) bagi semua rakyat. Pelopor pada bentuk hal-hal positif misalnya kepeloporan pada bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan pada penegakan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan pada kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, serta kepeloporan pada berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun jelas pelaksanaan pembangunan adalah tanggung jawab nasional, bukan sebagai beban pemerintah semata, dengan beberapa pertimbangan misalnya keselamatan negara, kapital terbatas, kemampuan yang belum memadai, tidak diminati rakyat dan secara konstitusional adalah tugas pemerintah, sangat mungkin masih banyak aktivitas yang tidak dapat diserahkan pada pihak swasta tetapi wajib dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan contoh mentalitas, nilai-nilai dan tujuan yang diharapkan dari seorang individu berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sedangkan posisi adalah status atau tempat individu dalam kerangka sosial dan merupakan tanda dan realisasi diri. Peran dicirikan juga sebagai perkembangan perilaku yang diharapkan oleh iklim sosial terkait dengan pekerjaan orang-orang dalam pertemuan yang berbeda.

2.2 Penyuluhan

2.2.1 Pengertian Penyuluhan

Menurut Notoatmodjo, (2017:15).Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan.

2.2.2 Metode penyuluhan

Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku sasaran penyuluhan. Untuk mencapai suatu hasil yang optimal, penyuluhan harus disampaikan menggunakan metode yang sesuai dengan jumlah sasaran. Menurut Notoatmodjo, 2017: 123). Metode penyuluhan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

a. Metode individual

Dalam promosi kesehatan, metode yang bersifat individual digunakan untuk membina perilaku baru, atau membina seseorang yang mulai tertarik

kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi.

b. Metode penyuluhan kelompok

Metode penyuluhan kelompok harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. Untuk kelompok yang besar, metodenya akan berbeda dengan kelompok kecil.

c. Metode penyuluhan massa

Metode penyuluhan massa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang sifatnya massa atau public.

2.2.3 Alat bantu penyuluhan

Alat bantu penyuluhan adalah alat-alat yang digunakan oleh petugas dalam menyampaikan bahan materi atau pesan kesehatan. Alat bantu ini lebih sering disebut alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu di dalam proses penyuluhan.

Edgar Dale (2017:12) membagi alat peraga tersebut menjadi sebelas macam dan menggambarkan tingkat intensitas tiap-tiap alat tersebut dalam sebuah kerucut. Dari kerucut tersebut dapat dilihat bahwa lapisan yang paling dasar adalah benda asli dan yang paling atas adalah kata-kata. Hal ini berarti bahwa dalam proses penerimaan pesan, benda asli mempunyai intensitasnya yang paling tinggi untuk mempersepsikan pesan dan informasi. Sedangkan penyampaian bahan yang hanya dengan kata – kata saja sangat kurang efektif atau intensitasnya paling rendah. Alat peraga akan sangat membantu dalam promosi kesehatan agar pesan-pesan kesehatan dapat disampaikan lebih jelas, dan masyarakat sasaran dapat menerima pesan tersebut dengan jelas dan tepat.

Alat peraga berfungsi agar seseorang lebih mengerti fakta yang dianggap rumit, sehingga mereka dapat menghargai betapa bernilainya kesehatan bagi kehidupan. Secara garis besar terdapat tiga macam alat peraga penyuluhan, antara lain:

- a. Alat bantu lihat (*visual aids*) yang berguna dalam membantu menstimulasi indra mata (penglihatan) pada waktu terjadinya proses penerimaan pesan, misalnya *slide*, film, dan gambar.
- b. Alat bantu dengar (*audio aids*) yang dapat membantu dalam menstimulasikan indra pendengar pada waktu proses penyampaian bahan pendidikan, misalnya : radio dan *Compact Disk* (CD).
- c. Alat bantu lihat-dengar (*audio visual aids*) yang dapat menstimulasi indra penglihatan dan pendengaran pada waktu proses penyuluhan, misalnya televisi, *video cassette* dan *Digital Versatile Disk* (DVD).

Media yang digunakan ketika melakukan penyuluhan adalah leaflet. Leaflet adalah suatu bentuk penyampain informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui lebaran yang dilipat, isi informasi dapat berupa bentuk kalimat maupun gambar atau kombinasi (Notoatmodjo, 2014). Leaflet dapat dijadikan media sosialisasi untuk mencapai tujuan berupa peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan perilaku. Kelebihan yang dimiliki media leaflet yaitu lebih bertahan lama dan dapat disimpan untuk dilihat sewaktu-waktu. Isi materi informasi yang disampaikan melalui media leaflet harus singkat, padat berupa pokok-pokok uraian yang penting saja dengan menggunakan kalimat yang sederhana.

Terdapat beberapa jenis leaflet dilihat dari segi fungsinya, pada rencana penelitian ini akan menggunakan leaflet yang berfungsi edukatif (perubahan perilaku). Leaflet ini mengandung sifat informatif, namun di dalamnya terkandung juga aspek edukatif. Isinya disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur-unsur pendidikan di dalamnya.

Menurut Ariny (2016:213) Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan komunikatif atau tidaknya sebuah leaflet adalah :

a. Bentuk

Bentuk leaflet harus diperhatikan agar mempermudah pembaca dalam memegang dan membaca leaflet tersebut.

b. Warna

Warna merupakan faktor yang sangat penting bagi leaflet, karena menjadi pemikat perhatian khalayak. Namun dalam pemilihan warna pada leaflet perlu memperhatikan tema dan isu apa yang dibahas agar sesuai dengan isi pesan.

c. Ilustrasi dan gambar

Adanya ilustrasi dan gambar dalam leaflet akan membantu pembaca memahami isi pesan yang disampaikan, selain itu juga akan membuat pesan semakin jelas.

d. Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa umum yang dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.

e. Huruf

Huruf harus terbaca dari jarak pandang baca yang normal (30 cm dari

mata), berarti harus menggunakan ukuran yang sesuai dan tidak terlalu kecil. Jenis dan bentuk huruf juga harus diperhatikan, karena berhubungan dengan kemudahan dan kenyamanan pembaca.

2.3 Penyuluhan Perikanan

Menurut Soekanto (2018:123) menyatakan bahwa Teori Penyuluhan Perikanan adalah suatu rangkaian konsep dan prinsip yang mencakup proses penyampaian informasi, edukasi, dan bimbingan kepada masyarakat perikanan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mereka dalam mengelola sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Teori ini mencerminkan filosofi, pendekatan, dan strategi yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan perikanan. Berikut adalah elemen-elemen kunci dalam Teori Penyuluhan Perikanan:

1. Partisipasi Aktif Masyarakat:

- Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat perikanan dalam proses penyuluhan. Melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan karena memperhitungkan kebutuhan, kearifan lokal, dan pengalaman praktis mereka.

2. Analisis Kebutuhan dan Konteks Lokal:

- Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, perlu dilakukan analisis kebutuhan masyarakat perikanan dan memahami konteks lokal. Ini mencakup identifikasi permasalahan, kebutuhan informasi, dan karakteristik budaya serta lingkungan setempat.

3. Pendekatan Partisipatif:

- Teori ini mendukung pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan implementasi program penyuluhan. Melibatkan masyarakat perikanan dalam menentukan tujuan, metode, dan evaluasi program dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan pesan penyuluhan.

4. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan:

- Tujuan utama penyuluhan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat perikanan. Informasi yang disampaikan harus relevan, mudah dimengerti, dan dapat diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari mereka, termasuk dalam manajemen sumber daya perikanan.

5. Pemberdayaan Masyarakat:

- Teori ini mengusung konsep pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat perikanan didorong untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri.

6. Penggunaan Metode dan Media yang Efektif:

- Metode penyuluhan harus dipilih secara bijaksana sesuai dengan karakteristik masyarakat perikanan, termasuk metode partisipatif, diskusi kelompok, demonstrasi lapangan, dan pemanfaatan media yang sesuai seperti brosur, video, atau platform digital.

7. Pendekatan Berbasis Kemitraan:

- Penyuluhan perikanan efektif melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga riset, organisasi nirlaba, dan swasta.

Kolaborasi ini dapat meningkatkan sumber daya, mendukung implementasi program, dan memperluas dampak penyuluhan.

8. Evaluasi Berkelanjutan:

- Proses penyuluhan perikanan harus melibatkan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak, mengevaluasi keberlanjutan program, dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Evaluasi dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan program penyuluhan di masa mendatang.

Dengan mengintegrasikan elemen-elemen tersebut, Teori Penyuluhan Perikanan dapat menjadi landasan untuk perancangan, implementasi, dan evaluasi program penyuluhan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan perikanan.

Menurut Yulianto (2018:123) Menyatakan bahwa Penyuluhan perikanan adalah suatu proses penyediaan informasi, pendidikan, bimbingan, dan bantuan kepada para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku sektor perikanan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta praktik-praktik yang berkaitan dengan perikanan. Tujuan utama penyuluhan perikanan adalah untuk membantu para nelayan dan pelaku sektor perikanan dalam mengelola usaha perikanan mereka secara lebih efektif, berkelanjutan, dan kompetitif.

Menurut Soekanto (2018:123) Mengatakan Pengertian penyuluhan perikanan mencakup beberapa aspek penting:

1. Penyediaan Informasi: Penyuluhan perikanan melibatkan penyediaan informasi terkini tentang teknik budidaya ikan, pengelolaan sumber daya perikanan, pemilihan alat tangkap yang sesuai, pengendalian penyakit

ikan, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan perikanan.

2. Pendidikan dan Pelatihan: Ini mencakup pendidikan dan pelatihan kepada para nelayan atau pembudidaya ikan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam berbagai aspek perikanan, termasuk pemeliharaan, pakan, kebersihan kolam, dan pemilihan lokasi budidaya.
3. Bimbingan dan Konsultasi: Penyuluhan perikanan juga mencakup bimbingan dan konsultasi yang dilakukan oleh penyuluh perikanan atau pakar dalam bidang perikanan. Ini membantu para nelayan atau petani/pembudidaya ikan mengatasi masalah yang muncul dalam usaha perikanan mereka.
4. Partisipasi dan Keterlibatan Petani: Prinsip partisipasi petani dalam proses penyuluhan perikanan sangat penting. Para nelayan diharapkan terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan.
5. Pemberdayaan: Penyuluhan perikanan bertujuan untuk memberdayakan para nelayan, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik, mengelola usaha perikanan mereka dengan lebih efisien, dan meningkatkan taraf hidup mereka
6. Keberlanjutan: Aspek keberlanjutan, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun lingkungan, menjadi perhatian dalam penyuluhan perikanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa praktik perikanan yang diperkenalkan juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
7. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan: Akhirnya, penyuluhan perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku sektor

perikanan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dari pendapat diatas dapat di Tarik kesimpulan bahwa Penyuluhan perikanan dilakukan oleh penyuluh perikanan, peneliti, akademisi, atau lembaga yang memiliki keahlian dalam berbagai aspek perikanan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada para nelayan atau petani/pembudidaya ikan serta masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

2.4 Kualitas Sumber Daya Manusia

Berikut beberapa pengertian dari kualitas yaitu menurut Imam Mulyana (2010 : 96) kualitas adalah Sebagai kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Selanjutnya dikatan menurut Hasibuan (2012:244) dikatakan pengertian sumber daya manusia adalah: Kemampuan terpadu dari daya fikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya.

Di bawah ini beberapa pengertian tentang sumber daya manusia adalah Menurut Wirawan (2015:18) menjelaskan bahwa Sumber daya Manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Hal senada disampaikan Soegoto (2014:306) memberi pengertian yaitu Sumber Daya Manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi.

Kemudian dipaparkan Rahardjo (2010:18) menjelaskan pengertian

Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu Kualitas sumber daya manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia adalah individu-individu atau yang disebut sebagai tenaga kerja, karyawan, potensi manusiawi yang bekerja untuk organisasi.

Berbicara tentang masalah kualitas sumber daya manusia tentunya ada tolak ukur yang dapat kita jadikan patokan atau perbandingan agar kita bisa mengetahui dan menentukan manusia yang berkualitas. Dengan adanya batasan dan tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang.

Pengertian yang dikemukakan oleh Selo Sumarjan (2009:43) yang dikutip oleh Sudarwan Danim (2012) bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kita inginkan dibedah atas dasar kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi dengan aspek keterampilan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kejujuran dan pengalaman.

2.5 Macam-macam Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Wibowo (2018:56) memberikan lima macam kualitas,

yang terdiri dari:

- a) *Task achievement* merupakan kategori kualitas yang berhubungan dengan kinerja baik. Kualitas yang berkaitan dengan Task achievement ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.
- b) *Relationship* merupakan kategori kualitas yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kualitas yang berhubungan dengan Relationship meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.
- c) *Personal attribute* merupakan kualitas intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal attribute merupakan kualitas yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.
- d) *Managerial* merupakan kualitas yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan

mengembangkan orang lain.

- e) *Leadership* merupakan kualitas yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kualitas berkenaan dengan *leadership* meliputi: kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen

2.6 Kualitas Petani Ikan

Menurut (Soekanto 2018) Teori Kualitas Petani Ikan dapat melibatkan beberapa dimensi yang mencerminkan kemampuan, pengetahuan, dan praktik yang memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya ikan. Dalam teori ini, kualitas petani ikan dipandang sebagai hasil dari kombinasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja mereka dalam kegiatan budidaya ikan. Berikut adalah dimensi-dimensi yang mungkin terlibat dalam Teori Kualitas Petani Ikan:

1. Pengetahuan Teknis:

- Kualitas petani ikan terkait erat dengan tingkat pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap metode budidaya yang efektif, manajemen tambak, pemilihan bibit unggul, serta penggunaan teknologi modern dalam kegiatan budidaya.

2. Keterampilan Praktis:

- Kemampuan petani ikan dalam menerapkan keterampilan praktis dalam kegiatan sehari-hari, termasuk keterampilan dalam pembenihan, pemberian pakan, pengelolaan air, dan keahlian lainnya, sangat memengaruhi kualitas budidaya dan hasil produksi.

3. Manajemen Usaha:

- Aspek manajemen usaha mencakup kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan keuangan tambak. Manajemen yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membawa dampak positif pada kesejahteraan ekonomi petani.

4. Pendidikan dan Pelatihan:

- Tingkat pendidikan dan partisipasi dalam pelatihan dapat memengaruhi kualitas petani ikan. Pendidikan formal dan pelatihan terkait dengan budidaya ikan dapat membuka akses terhadap pengetahuan baru dan inovasi dalam kualitas petani lele di Kota Binjai.

5. Keterlibatan Dalam Inovasi:

- Kemampuan petani ikan untuk menerima dan menerapkan inovasi dalam praktik budidaya mereka dapat meningkatkan kualitas. Ini mencakup penerimaan terhadap teknologi baru, metode budidaya yang lebih efisien, dan adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan.

6. Keterlibatan dan Hubungan dengan Penyuluh Perikanan:

- Interaksi antara petani ikan dan penyuluh perikanan juga dapat menjadi faktor penentu kualitas. Keterlibatan petani dalam program penyuluhan, bimbingan teknis, dan hubungan yang baik dengan penyuluh perikanan dapat memberikan dampak positif pada kemampuan mereka.

7. Respons Terhadap Perubahan Lingkungan dan Iklim:

- Kemampuan petani ikan untuk merespons perubahan lingkungan dan iklim dapat menjadi aspek penting dalam kualitas mereka. Hal ini mencakup

adaptasi terhadap fluktuasi suhu air, pola curah hujan yang berubah, dan dampak lainnya terhadap budidaya ikan.

Dengan memahami dan mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut, Teori Kualitas Petani Ikan dapat memberikan pandangan holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas dan keberlanjutan usaha budidaya ikan, serta menjadi dasar untuk merancang program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas petani ikan secara menyeluruh.

2.7 **Peternakan Ikan Lele**

Ikan Lele termasuk salah satu ikan yang budidayanya cukup mudah dan pertumbuhannya sangat cepat. Sehingga banyak banyak pelaku bisnis perikanan yang memilih ikan lele sebagai komoditas budidayanya.

Menurut Prasetya dkk (2013:27) bahwa "Lele merupakan salah satu ikan populer yang sudah akrab di kalangan masyarakat. Menjamurnya warung makan pecel lele saat ini, baik dalam bentuk rumah makan maupun warung tenda, merupakan potensi bisnis yang cukup besar".

Lele termasuk ikan yang mudah untuk beradaptasi sehingga ikan ini bisa dipelihara di berbagai media pemeliharaan, salah satunya di kolam terpal. Kolam terpal adalah kolam yang dasar maupun sisi dindingnya di buat dari terpal. Dari mulai proses pemijahan sampai pembesaran ikan lele bisa dilakukan pada kolam terpal. Untuk cara pembuatan kolam terpal bisa anda lihat di artikel sebelumnya.

Untuk melakukan pemijahan ikan lele ada beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Kolam

Kolam yang harus disiapkan yaitu kolam pemijahan dan kolam penetasan telur. Untuk kolam pemijahan bisa menggunakan kolam dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi kolam 50 centimeter yang di isi air dengan ketinggian 20 – 25 cm. Untuk kolam penetasan bisa menggunakan kolam bekas pemijahan atau kolam lain yang di lengkapi dengan pelindung dari hujan dan sinar matahari yang bisa di buka tutup sesuai kebutuhan.

2. Kakaban

Kakaban berfungsi untuk menempelnya telur lele

3. Seleksi Induk

a. Ciri-ciri induk lele jantan:

- Kepalanya lebih kecil dari induk ikan lele betina.
- Warna kulit dada agak tua bila dibanding induk ikan lele betina.
- Urogenital papilla (kelamin) agak menonjol, memanjang ke arah belakang, terletak di belakang anus, dan warna kemerahan.
- Gerakannya lincah, tulang kepala pendek dan agak gepeng (depress).
- Perutnya lebih langsing dan kenyal bila dibanding induk ikan lele betina.
- Bila bagian perut di stripping secara manual dari perut ke arah ekor akan mengeluarkan cairan putih kental (spermatozoa-mani).
- Kulit lebih halus dibanding induk ikan lele betina.

b. Ciri-ciri induk lele betina

- Kepalanya lebih besar dibanding induk lele jantan.
- Warna kulit dada agak terang.
- Urogenital papilla (kelamin) berbentuk oval (bulat daun), berwarnakemerahan, lubangnya agak lebar dan terletak di belakang anus.
- Gerakannya lambat, tulang kepala pendek dan agak cembung.
- Perutnya lebih gembung dan lunak.
- Bila bagian perut di stripping secara manual dari bagian perut ke arah ekor akan mengeluarkan cairan kekuning-kuningan (ovum/telur).

Dalam pembibitan ikan lele dilakukan proses pemijahan sebagai berikut:

1. Masukkan induk lele jantan dan betina yang sudah terpilih ke kolam pemijahan. Biasanya induk lele yang siap mijah akan saling berdekatan, usahakan kondisi disekitar kolam pemijahan tenang agar lele tidak stress.
2. Masukkan kakaban ke dalam kolam pemijahan, atur kakaban sedemikian rupa sehingga kakaban tetap berada di dasar kolam selama proses pemijahan.
3. Tutup kolam pemijahan, tujuannya untuk mencegah lele loncat dari kolam pemijahan.
4. Pemijahan biasanya akan berlangsung malam hari sekitar pukul 10 malam dan akan berakhir menjelang pagi.

5. Keesokan harinya telur akan terlihat menempel pada kakaban, telur yang terbuahi akan terlihat putih kekuning kuning (cerah)
6. Kakaban di angkat untuk memudahkan mengambil induk yang sudah dipijahkan. Jika penetasan telur dilakukan di kolam bekas pemijahan kakaban di susun kembali usahakan semua telur terendam oleh air. Jika menggunakan kolam lain untuk menetas maka kakaban dimasukan ke kolam penetasan.
7. Dalam rentang waktu 20-24 jam telur lele akan menetas menjadi larva, akan tetapi larva lele masih lemah biasa masih berada pada kakaban. Keesokan harinya setelah lele menetas baru larva lele meninggalkan kakaban, biasanya larva lele akan berkumpul di pojok dasar kolam, segera kakaban diangkat karena apabila kakaban tidak segera diangkat telur yang tidak menetas akan membusuk dan mencemari kolam
8. Larva lele mulai diberi makanan setelah 3 hari menetas. Pakan yang di berikan yaitu cacing sutra segar. Pemberian cacing sutra dilakukan selama 20 hari, berikan cacing sutra sedikit – sedikit usakan cacing sutra selalu tersedia di kolam agar diperoleh pertumbuhan lele yang baik.
9. Setelah berumur 20 hari lele berukuran 3-4 cm lakukan penyortiran

Kemudian lele dipelihara di kolam pendederan. perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun focus dan

maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai.

2.8 Keterbatasan Anggaran

Menurut Mowen (2007:316) Keterbatasan anggaran adalah kondisi di mana sumber daya finansial yang tersedia untuk suatu proyek, program, organisasi, atau individu tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan atau tujuan yang diinginkan. Ini adalah masalah yang umum di banyak bidang kehidupan, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan pribadi. Berikut adalah beberapa pendapat tentang keterbatasan anggaran:

1. **Tantangan Prioritisasi:** Keterbatasan anggaran memaksa individu atau organisasi untuk memprioritaskan kebutuhan dan tujuan mereka. Ini dapat menjadi tantangan karena seringkali ada banyak hal yang perlu dilakukan atau dipenuhi, tetapi dana terbatas tidak dapat mengakomodasi semuanya. Prioritisasi yang bijak diperlukan untuk memastikan sumber daya digunakan seefisien mungkin.
2. **Dorongan untuk Kreativitas:** Keterbatasan anggaran dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Ketika seseorang atau organisasi dihadapkan pada batasan sumber daya, mereka sering mencari cara baru untuk mencapai tujuan mereka. Ini dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien dan efektif.
3. **Pentingnya Perencanaan Keuangan:** Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, perencanaan keuangan yang baik sangat penting. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya finansial dengan bijak,

mengidentifikasi prioritas, menghindari pemborosan, dan mencari peluang untuk menghemat.

4. **Dampak pada Kualitas Pelayanan:** Dalam organisasi atau sektor pelayanan, keterbatasan anggaran dapat memengaruhi kualitas layanan yang disediakan. Hal ini dapat mencakup pemotongan tenaga kerja, pengurangan fasilitas, atau pembatasan akses ke layanan tertentu.
5. **Kesadaran tentang Pengeluaran:** Keterbatasan anggaran dapat membantu individu dan organisasi untuk lebih sadar tentang pengeluaran mereka. Hal ini dapat memicu pertanyaan penting tentang apakah pengeluaran yang dilakukan benar-benar diperlukan atau bermanfaat.
6. **Manajemen Risiko:** Keterbatasan anggaran adalah faktor risiko yang harus dikelola. Pengelolaan risiko finansial melibatkan perencanaan untuk kemungkinan perubahan anggaran dan cara mengatasi keterbatasan yang mungkin timbul.
7. **Kendala Pengembangan:** Dalam konteks pembangunan, keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Pemerintah dan lembaga pembangunan harus menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan cermat untuk mencapai hasil yang optimal.
8. **Tantangan Ketidaksetaraan:** Keterbatasan anggaran dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya finansial cenderung lebih terpuak oleh keterbatasan tersebut.

Disamping fungsi dan kegunaan anggaran yang telah dikemukakan diatas, anggaran juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Angka anggaran tidak selalu tepat karena angka tersebut ditetapkan dengan menggunakan asumsi dan taksiran.
- b. Anggaran terus menerus disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah- ubah.
- c. Pelaksanaan anggaran tidak terjadi dengan otomatis, oleh sebab itu diperlukan partisipasi dari semua pihak untuk terealisasinya anggaran yang telah direncanakan.
- d. penganggaran tidak menghilangkan kebutuhan akan pertimbangan manajemen. Jadi anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam tugasnya, bukan untuk menggantikan kebijakan atau perana n manajemen.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Keterbatasan anggaran adalah tantangan yang nyata dalam banyak aspek kehidupan, dan penting untuk mengelolanya dengan bijak. Dalam situasi ini, perencanaan yang matang, prioritasasi yang baik, inovasi, dan pengelolaan sumber daya yang efisien menjadi kunci untuk mengatasi hambatan yang muncul akibat sumber daya finansial yang terbatas.

2.9 Sarana dan Prasarana yang masih tradisional

Menurut Barmawi (2012:23) Sarana dan prasarana tradisional adalah unsur-unsur fisik dan infrastruktur yang digunakan dalam berbagai kegiatan, tetapi mereka didasarkan pada metode dan teknologi yang telah ada sejak lama

dan seringkali tidak mengikuti perkembangan teknologi terkini. Berikut adalah beberapa pendapat tentang sarana dan prasarana tradisional:

1. **Penting dalam Konservasi Budaya:** Sarana dan prasarana tradisional sering kali merupakan bagian integral dari warisan budaya suatu masyarakat. Mereka mencerminkan cara hidup, keahlian tradisional, dan nilai-nilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan.
2. **Sumber Daya Terbatas:** Di banyak wilayah di dunia, sumber daya terbatas membatasi kemampuan untuk mengadopsi teknologi modern. Oleh karena itu, sarana dan prasarana tradisional tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu.
3. **Kemampuan untuk Beradaptasi dengan Lingkungan:** Sarana dan prasarana tradisional sering kali dikembangkan berdasarkan pengetahuan lokal tentang kondisi lingkungan, dan mereka mungkin lebih cocok untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang lambat.
4. **Berperan dalam Pembangunan Berkelanjutan:** Penggunaan sarana dan prasarana tradisional dapat mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Mereka sering dibangun dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang berkelanjutan dan praktik-praktik ramah lingkungan.
5. **Penghambat Kemajuan:** Namun, dalam beberapa konteks, sarana dan prasarana tradisional juga dapat menjadi penghambat dalam mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Mereka mungkin tidak efisien atau kurang aman dibandingkan dengan teknologi modern.

6. **Tantangan Perawatan dan Pemeliharaan:** Sarana dan prasarana tradisional memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang berkelanjutan agar tetap berfungsi. Ini bisa menjadi tantangan dalam situasi di mana masyarakat atau pemerintah kurang memiliki sumber daya untuk menjaga infrastruktur ini.
7. **Potensi untuk Inovasi:** Ada potensi untuk menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan teknologi modern dalam pengembangan sarana dan prasarana yang lebih baik. Ini bisa menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
8. **Perlunya Pendekatan Kontekstual:** Penting untuk mengadopsi pendekatan yang kontekstual dalam mempertimbangkan penggunaan sarana dan prasarana tradisional. Setiap konteks lokal berbeda, dan kebijakan atau tindakan yang cocok di satu tempat mungkin tidak berlaku di tempat lain.
9. **Pentingnya Pelibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait sarana dan prasarana tradisional adalah kunci. Ini memungkinkan penerimaan yang lebih baik dari solusi-solusi yang diusulkan dan memastikan penggunaan yang berkelanjutan.

Dalam pendapat di atas dapat saya simpulkan bahwa sarana dan prasarana tradisional memainkan peran penting dalam masyarakat di seluruh dunia. Mereka mencerminkan warisan budaya, pengetahuan lokal, dan cara beradaptasi dengan lingkungan. Namun, penggunaan dan pelestariannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dan solusi inovatif yang menggabungkan elemen tradisional dan

teknologi modern mungkin diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial.

2.10 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang akan penulis lakukan nantinya.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nisma Hanum Batubara pada tahun 2019 dengan judul Peran Penyuluh Perikanan Bantu (PBB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Muslim Di Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk meneliti subjek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh perikanan berperan dalam memfasilitasi proses penyuluhan, penyebaran informasi, pendampingan dan pemantauan kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun faktor pendukung Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yaitu bantuan modal, asuransi kepada nelayan yang mengalami kecelakaan dan memberikan sarana tempat seperti TPI dan Pelabuhan. Dan Penyuluh Perikanan Bantu berhasil dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dilihat dari bertambah dan meningkatnya pendapatan masyarakat nelayan muslim di Tanjung Leidong.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ade Mitra Khusuma pada tahun 2019 dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Program

Penyuluhan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus (casestudy) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung kelapangan, karena studi kasus merupakan metode yang menjelaskan jenis penelitian mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu, atau suatu fenomena yang ditemukan pada suatu tempat yang belum tentu sama dengan daerah lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program Penyuluhan pertanian di Desa Pulau Sarok, dari segi realisasi program yang paling efektif diperoleh petani adalah kegiatan pelatihan. Dari segi ketercapaian tujuan, secara keseluruhan kegiatan penyuluhan dapat dikatakan efektif. Dan program yang paling tinggi efektivitasnya adalah kegiatan evaluasi kelompok tani.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hafid Fachri pada tahun 2019 dengan judul Peran Penyuluh Perikanan Dalam Pengembangan Sektor Perikanan Di Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan cara mengundang para pelaku kegiatan perikanan baik dari pihak pemerintah seperti penyuluh dan perwakilan dinas perikanan dan kelautan sebagai informasi serta para nelayan dan petani tambak sebagai responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan perikanan di

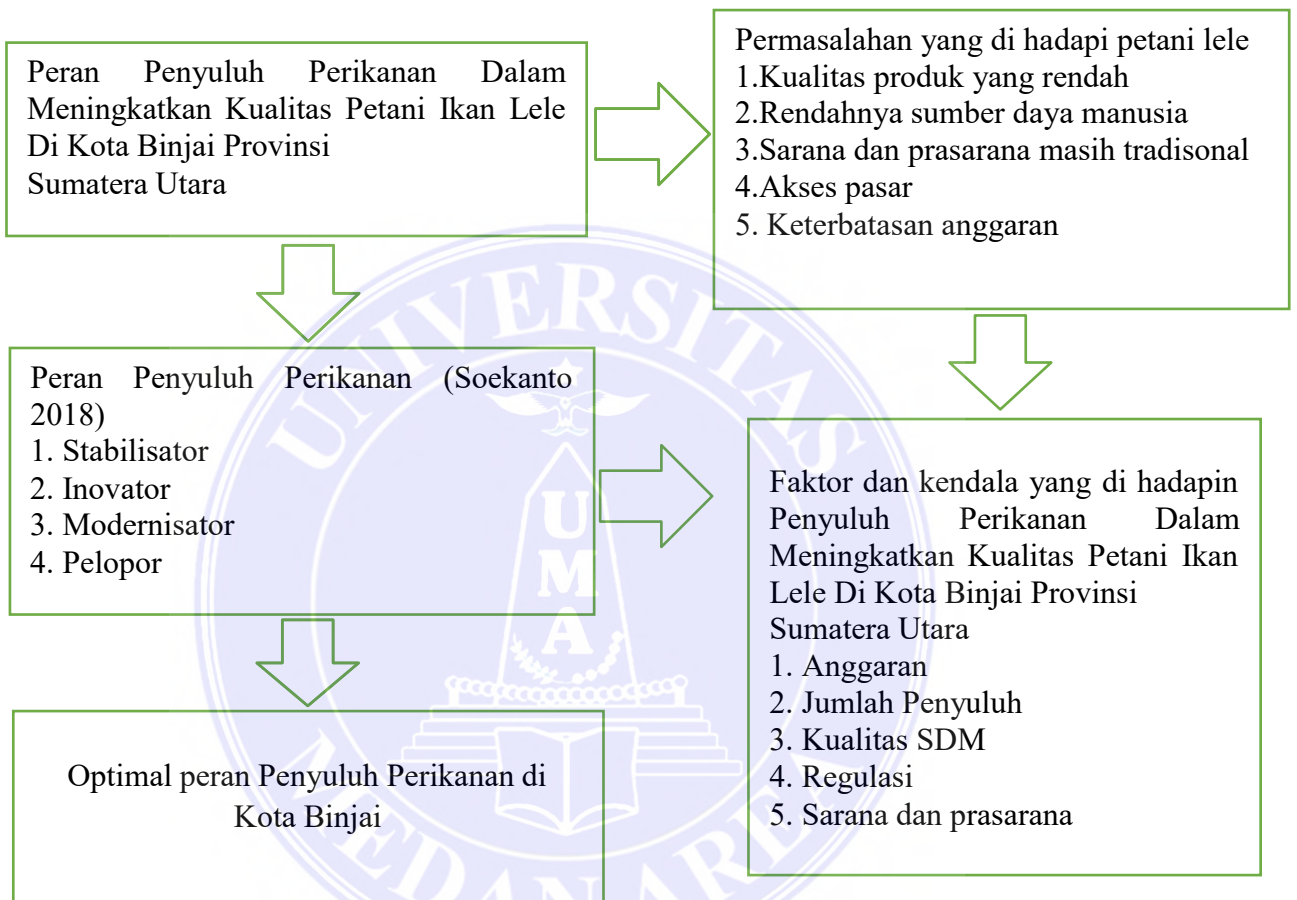
Kabupaten Aceh Utara, penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat besar diantaranya berperan dalam penyampaian informasi, penyaluran saluran sarana produksi, serta dalam proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2.11 Kerangka Berfikir

Penyuluh perikanan merupakan agen bagi perubahan perilaku bagi petani perikanan, yaitu mampu mendorong petani mengubah perilakunya menjadi petani dengan kemampuan yang lebih baik dan mampu mengambil keputusan sendiri, yang nantinya akan berperan andil dalam proses pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Sehingga penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat penting bagi petani karena penyuluh bertugas memberikan informasi kepada petani mengenai teknologi yang berkembang saat ini atau membantu petani ikan lele dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini.

Penyuluh perikanan memiliki peran dalam pengembangan kelompok nelayan dan petani/pembudidaya ikan, melalui perannya seperti pendampingan, penyampaian informasi, dan sebagai motivator. Peran Penyuluh ini dilaksanakan sesuai dengan proses pelaksanaan penyuluhan mulai dari sumber (Penyuluh), pesan yang akan disampaikan, saluran yang digunakan, serta penerima (petani/pembudidaya ikan).

Gambar 2.1 Kerangka penelitian



Sumber Hasil olahan peneliti 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang diawali dari adanya minat seseorang dalam memahami suatu fenomena yang kemudian berkembang menjadi ide, teori dan konsep. Untuk mencapai tujuan ilmiah dalam sebuah penelitian dibutuhkan satu metode yang tepat, karena metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sugiyono (2018:2) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Penyuluh Perikanan Dalam Meningkatkan Kualitas Petani Ikan Lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala Penyuluh Perikanan Dalam Meningkatkan Kualitas Petani Ikan Lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang beralamat di Jalan Jambi No. 9 Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024 s/d April 2024.

3.3 Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif subyek penelitian disebut dengan istilah informan. Subjek penelitian memiliki peran sangat penting dalam sebuah penelitian, karena subjek penelitian adalah orang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian yang dilakukan. Moleong (2006;132) menyatakan bahwa Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu:

1. Informan kunci : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara
2. Informan Utama : - Kabid Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara
- Koordinator Penyuluh Perikanan pada Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara
3. Informan Tambahan : 4 (empat) orang petani lele di Kota Binjai

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data Data merupakan kumpulan fakta- fakta berupa angka, simbol, atau tulisan, yang diperoleh dengan mengamati suatu objek. Data yang baik adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya (reliable), akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yakni :

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Sugiyono (2018:456) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dimana data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau dimana tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder tidak dikumpulkan oleh peneliti langsung dari objek yang diteliti, melainkan data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain. Sugiyono (2018:456) menyatakan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang terkait dengan judul penelitian mengenai Peran Penyuluh Perikanan Dalam Peningkatan Kualitas Petani Ikan Lele Di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Data primer di peroleh langsung peneliti dari subjek penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Bungin (2007) menyatakan bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independent terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (indepht interview) dengan berpodoman pada interview-guidances (podoman wawancara) yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian. Dilakukan secara terbuka fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang Peranan Penyuluh Perikanan Dalam Meningkatkan Kualitas Petani/Pembudidaya Ikan Lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi peneliti untuk melihat kenyataan dan fakta sosial ssehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek peneliti secara langsung yang digunakan untuk mendapat data tentang Peranan Penyuluh Perikanan Dalam Meningkatkan Kualitas Petani/Pembudidaya Ikan Lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dalam bentuk catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peran Penyuluh Perikanan dalam Peningkatan Kualitas Petani Ikan Lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2018:482).

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) terdapat tiga alur kegiatan dalam analisis data yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Sugiyono (2018:247-249) menyatakan reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tujuan yang akan dicapai yang telah ditentukan sebelumnya akan menjadi panduan dalam mereduksi data. Kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi dalam proses berfikir kritis sangat diperlukan dalam proses reduksi data.

2. Penyajian Data (Data Display)

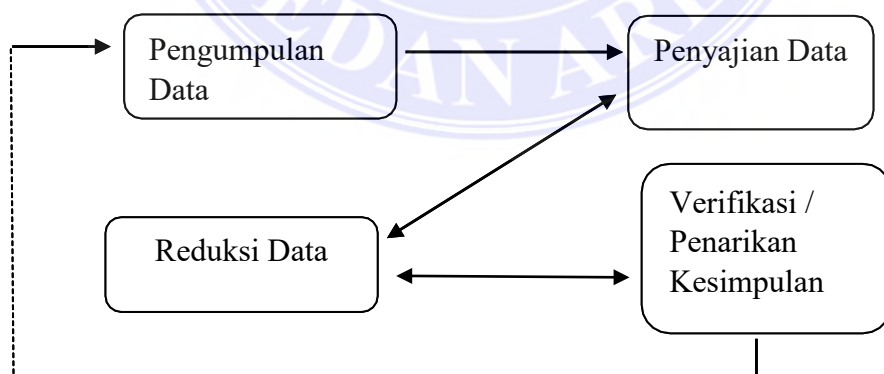
Penyajian data bertujuan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Pada penelitian kualitatif biasanya penyajian data berbentuk uraian singkat, bagan, tabel, dan lainnya (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018: 252) Analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dalam analisis data ini terbagi atas kesimpulan sementara dan kesimpulan kredibel. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah bila pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti pendukung yang kuat. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas setelah diteliti. Kesimpulan dengan bukti-bukti valid dan konsisten yang dikumpulkan peneliti dilapangan disebut kesimpulan yang kredibel.

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi

selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 3.1 : Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

3.7 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.7.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan indikator yang diteliti.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. Peran menurut Soekanto (2001:242) adalah proses dinamis status atau kedudukan, menyiratkan kinerja peran ketika menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran itu. Perbedaan posisi dan peran saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung satu sama lain.
- b. Peran penyuluhan petani perikanan menurut Sumaryadi (2005:111) adalah upaya untuk menata petani perikanan dalam kebersamaan dengan upaya memperkuat kelembagaan petani perikanan sehingga mereka dapat mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan

3.7.2 Definisi Operasional

Peran penyuluh perikanan dalam pembangunan dijelaskan oleh Soekanto (2018) bahwa pemerintah memainkan peran dominan dalam proses pembangunan. Peran yang ditekankan adalah stabilisator, inovator, modernisator, dan pelopor kegiatan pembangunan tertentu. Rincian peran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Stabilisator, kiprah pemerintah merupakan mewujudkan perubahan tanpa berubah sebagai suatu gejolak sosial, yang bisa menjadi ancaman bagi keutuhan nasional dan kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut bisa terwujud dengan cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses pengenalan yang elegan namun efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang sedikit demi sedikit namun berkesinambungan
- b. Inovator, dalam menjalankan perannya sebagai inovator, seluruh pemerintah harus menjadi sumber inovasi. Oleh karena itu, kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar dapat menjalankan perannya secara efektif memerlukan tingkat legitimasi yang tinggi. Misalnya, pemerintah yang "memenangkan" perebutan kekuasaan atau memenangkan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil dengan sedikit legitimasi akan kesulitan untuk membawa inovasinya ke publik. Tiga hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah penerapan inovasi pertama yang dilakukan dalam lingkungan birokrasi, inovasi konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan setiap negara ingin berubah menjadi negara yang kuat, mandiri dan diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki sehingga

mempunyai nilai tambah yang tinggi. Sistem pendidikan nasional yang tangguh, yang membentuk masyarakat yang produktif, landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, mempunyai visi yang jelas mengenai masa depan yang diinginkan sebagai orientasi.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah wajib sebagai panutan (*role model*) bagi semua rakyat. Pelopor pada bentuk hal-hal positif misalnya kepeloporan pada bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan pada penegakan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan pada kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, serta kepeloporan pada berkorban demi kepentingan negara.

Definisi operasional ini akan memandu proses pengumpulan data, analisis, dan evaluasi dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat mengukur secara konkret peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di wilayah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyuluh Perikanan pada Dinas ketahanan dan Pertanian Kota Binjai telah melaksanakan peran sebagai stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dalam peningkatan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara namun belum memberikan hasil yang optimal.
2. Kendala - kendala yang dihadapi Penyuluh Perikanan pada Dinas ketahanan dan Pertanian Kota Binjai dalam peningkatan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara adalah : sulitnya melakukan perubahan system budidaya yang dilakukan petani dari tradisional ke system intensif dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya sumber daya manusia pada penyuluh perikanan seperti keterbatasan jumlah, keahlian teknis maupun non teknis dan kompetensi yang merupakan kekuatan dalam menjalankan peran membina masyarakat petani lele, regulasi yang membatasi gerak dalam berinovasi untuk mengatasi masalah biaya pakan, kemampuan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang masih sangat kurang untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan petani ikan lele serta masih kurangnya kerjasama lintas sektoral antar instansi dalam upaya pemberdayaan peran penyuluh perikanan dalam

peningkatan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai provinsi Sumatera Utara.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diambil dari judul "Peran Penyuluh Perikanan dalam Meningkatkan Kualitas Petani Ikan Lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara":

1. Adanya pemberian bantuan dan peningkatan sarana dan prasarana petani ikan lele agar praktik budidaya dapat berkembang dari system tradisional ke system intensif
2. Meningkatkan pengetahuan penyuluh dalam berinovasi untuk mencari solusi dari tingginya biaya pakan yang dibutuhkan petani lele sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
3. Adanya penambahan jumlah penyuluh perikanan sehingga waktu kunjung dalam membina dan meningkatkan kualitas petani cukup
4. Penambahan Anggaran Pemerintah terhadap porsi bantuan sarana dan prasarana moderisasi untuk peningkatan produktifitas dan kualitas petani yang masih mengandalkan system budidaya dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang masih tradisional.
5. Penguatan Kolaborasi dengan menggalang kerjasama antara penyuluh perikanan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta

untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran penyuluh perikanan dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor perikanan di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Alfadia, D. Z. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan IT/Komputer Hardware dan Software di Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Kota Tangerang*.
- Asang, Sulaiman. 2012. *Membangun Sumber Daya Berkualitas*. Makassar: Brlan Internasional Surabaya.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amanah, S. dan N. Farmayanti. 2014. *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem dan Daya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Arafah. 2009. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Budi Daya Ikan*. Bumi Aksara, Bogor.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bacal, R. 2011. *Performance Management. Terjemahan Surya Dharma dan Yanuar Irawan*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Cangara, H. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sastrawidjaya, dkk. 2002. *Nelayan Nusantara*. Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono . (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Pers.

Sudarmanto, Eko, dkk., 2020. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung : CV. Alfabeta

Suharto,

Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*.

Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:

Bumi Aksara

Sumodiningrat, Gunawan. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama

Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.

Grasindo Sutarto. 2009. *Dasar-Dasar Organisasi*.

Yogyakarta: UGM press

Jurnal :

Alawiyah, W. 2016. Perbedaan metode komunikasi pertanian yang diberikan terhadap pengetahuan dan keterampilan petani perikanan dan budidaya perikanan dalam penerapan teknologi pertanian di Desa Teluk Dawan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *J. Ilmiah*. **16** (1) : 148-152.

Alif, M. 2017. Partisipasi petani dalam komunikasi penyuluhan (studi pada Kelompok budidaya perikanan Sumber Murni Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru). *J. Komunikasi*. **2** (2) : 155-168.

Amahorseya, R. M., H. Cangara. dan S. Sjam. 2014. Peran penyuluh pertanian sebagai komunikator dalam penerapan usaha pertanian lahan sempit di

Desa Hukurila Kotamadya Ambon. *J. Komunikasi*. **3** (4) : 249-255.

Asih dan Pratiwi. 2010. Perilaku prososial ditinjau dari empati dan kematangan emosi. *J. Psikologi*. **1** (1) : 33-42.

Bahua, I. dan L. Marleni. 2016. Model pengembangan kualitas penyuluh pertanian di Provinsi Gorontalo. *J. Sosial Ekonomi Pertanian*. **9** (1) : 13-19.

Darmaludin, S. Suwasono, dan R. E. Muljawan. 2012. Peranan penyuluh pertanian dalam penguatan usahatani bawang daun di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. *J. Buana Sains*. **12** (1) : 71-80.

Dwiwati, D. M.N. Suparta dan G. S. A. Putra. 2016. Dampak teknik penyuluhan Focus Group Discussio (FGD) terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan penerapan pada penyuluh dan peternak Sapi Bali di Bali. *J. Penyuluhan*. **19** (1) : 28-33.

Eswandi. 2017. Komunikasi penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam meningkatkan produksi padi di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. *J. Komunikasi*. **4** (1) : 1-15.

Faqih, A. 2014. Peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam kegiatan pemberdayaan kelompok tani terhadap kinerja kelompok tani. *J. Agrijati*. **26** (1): 41-60.

Internet :

KBBI Daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Availableat: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenangdiakses> pada 27 Januari 2022

Lampiran I

Kuesioner Penelitian

1. Bagaimana peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

a. Stabilisator

Bagaimana stabilisator peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

b. Inovator

Bagaimana inovator peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

c. Modernisator

Bagaimana modernisator peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

d. Pelopor

Bagaimana pelopor peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani ikan lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

LEMBAR JAWABAN :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

2. Faktor kendala peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

a. Stabilisator

Faktor-faktor apa yang menjadi kendala stabilisator peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

b. Inovator

Faktor-faktor apa yang menjadi kendala inovator peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

c. Modernisator

Faktor-faktor apa yang menjadi kendala modernisator peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

d. Pelopor

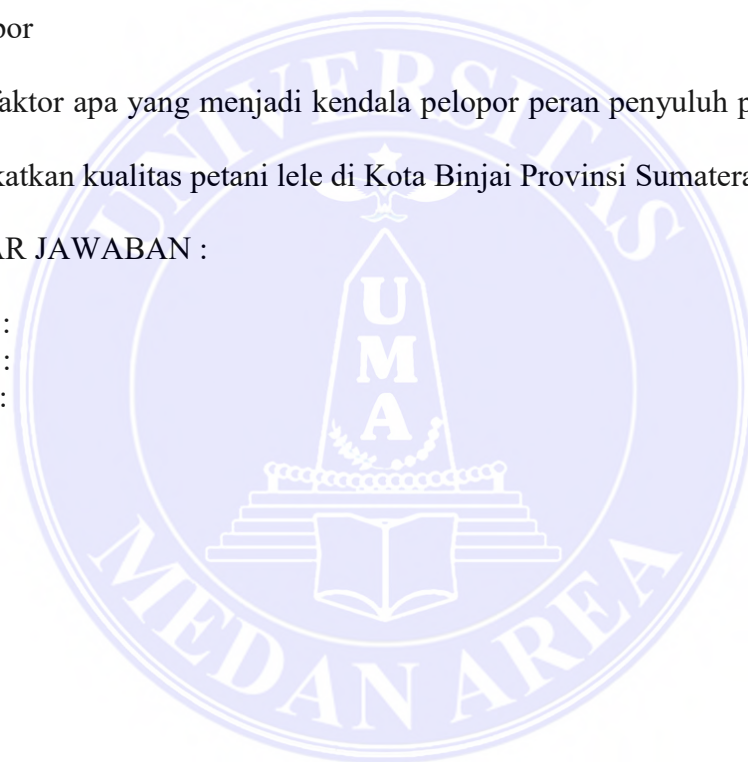
Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pelopor peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kualitas petani lele di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

LEMBAR JAWABAN :

Nama :

Jabatan :

Instansi :



Lampiran II

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai Informan Kunci



Wawancara dengan Kabid Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai informan kunci



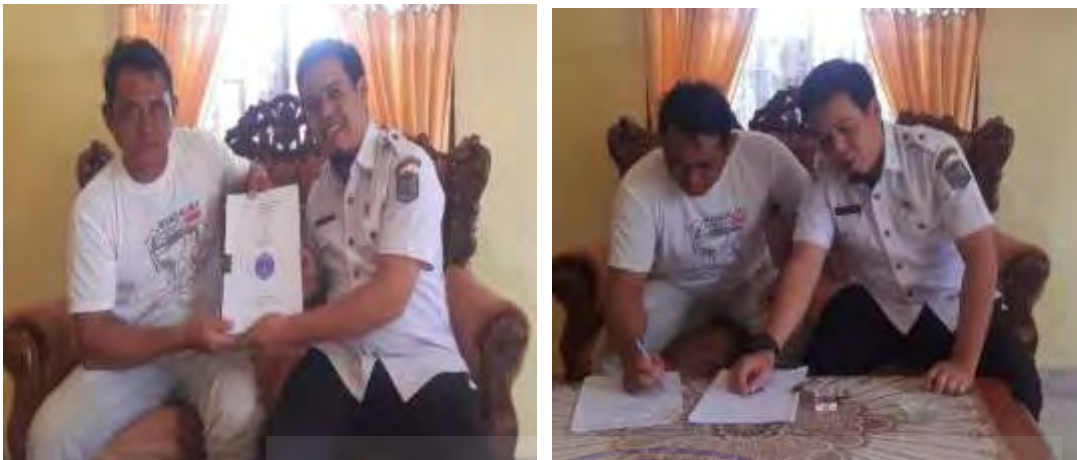
Wawancara dengan Bapak Jamalus S.Pi Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Binjai sebagai informan tambahan



Wawancara dengan Bapak Suwanto Petani Ikan di Kota Binjai sebagai Informan Tambahan



Wawancara dengan Bapak Darto Petani Ikan di Kota Binjai sebagai Informan Tambahan



Wawancara dengan Bapak Wenang Petani Ikan di Kota Binjai sebagai Informan Tambahan



Foto kegiatan penyerahan bantuan kepada petani lele di Kota Binjai